



RINGKASAN

RINJANI YUSNI MAHARJANTI. Tata Kelola dan Analisis Keuangan pada Pusat Investasi Pemerintah. Dibimbing oleh HERMANTO SIREGAR dan Tb. NUR AHMAD MAULANA.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai operator investasi Pemerintah dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga penghimpun kekayaan negara atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan tata kelola yang dilakukan PIP terhadap rasio keuangan dan menganalisis kinerja keuangan pada PIP berdasarkan analisis laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2012. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dengan pilihan jawaban berdasarkan skala Likert. Responden penelitian berjumlah 31 orang yang terdiri dari *middle management* PIP. Penarikan data menggunakan metode penarikan purposif. Data sekunder berupa Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Terdapat dua hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. Hipotesis pertama yaitu, terdapat hubungan antara tata kelola dengan rasio keuangan. Variabel tata kelola yang digunakan sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan variabel rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Untuk menguji hipotesis ini digunakan Uji tabel *contingency* yang memiliki distribusi X^2 dengan menggunakan SPSS. Hipotesis kedua yaitu, untuk menguji apakah *Return on Investment* (ROI) dan *Return on Equity* (ROE) PIP berada pada kondisi yang baik. Dasar pengambilan keputusan untuk hipotesis ini adalah nilai ROI dan ROE PIP lebih besar dibanding nilai rata-rata ROI dan ROE perbankan.

Berdasarkan persepsi responden, secara umum PIP telah melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik. Namun, masih banyak responden yang menyatakan kurang setuju pada pernyataan tentang struktur organisasi, *Standard Operating Procedure* (SOP), mekanisme pengambilan keputusan, dan arahan pimpinan agar mencapai visi dan misi organisasi. Sebagai organisasi di bawah pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pimpinan dalam memberi arahan tugas menjadi hal yang dibatasi. Uji hubungan tata kelola dan rasio keuangan menghasilkan empat pasang variabel yang memiliki signifikansi atau memiliki hubungan yaitu, transparansi dengan solvabilitas, responsibilitas dengan solvabilitas, independensi dengan profitabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan dengan profitabilitas.

Secara umum analisis keuangan PIP menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Ada beberapa komponen neraca yang tidak dimiliki oleh PIP. Hal ini dikarenakan PIP baru saja berdiri sehingga masih dalam tahap pengembangan. Hasil uji perbandingan nilai ROI dan ROE PIP dengan rata-rata perbankan menunjukkan bahwa masih banyak nilai ROI dan ROE PIP yang berada di bawah rata-rata perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen PIP belum efektif dan efisien dalam mengelola aset maupun ekuitasnya untuk menghasilkan profit. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kegiatan investasi yang dapat dilakukan oleh



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

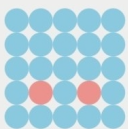
PIP karena mengikuti peraturan yang berlaku. Sebagai organisasi di bawah pemerintah PIP memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa rekomendasi dan saran baik untuk PIP maupun pemerintah sebagai satu-satunya pemilik saham PIP. Terkait tata kelola, PIP sebagai badan pemerintah berbentuk badan layanan umum perlu memperbaiki struktur dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam PIP. Memperbaiki struktur dapat dilakukan dengan memperjelas hak dan kewajiban pegawai pada masing-masing tingkatan kedudukan atau jabatan. Perbaikan ini juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan PIP dibatasi terutama untuk kegiatan investasi yang besar. Oleh sebab itu keputusan mengenai organisasi yang dapat diambil tanpa persetujuan pemerintah (DPR) perlu diorientasikan pada pencapaian misi dan visi PIP dan kemajuan organisasi.

Terkait kinerja keuangan, profitabilitas PIP harus lebih ditingkatkan. Sebagai badan pemerintah yang sumber permodalannya telah dijamin, PIP memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan profit yang tinggi. Oleh karena itu di masa yang akan datang PIP perlu melakukan investasi di bidang yang strategis. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengurangi proporsi investasi jangka pendek berupa deposito di beberapa bank. Selain memberikan keuntungan yang relatif kecil, bentuk investasi ini pun kurang memberikan manfaat sosial. Proporsi investasi PIP perlu ditingkatkan dalam pemberian pinjaman pada BUMN dan PEMDA. Selain dapat memberikan manfaat sosial diantaranya meningkatkan pembangunan daerah, pemberian pinjaman ini relatif aman karena resiko gagal bayarnya kecil.

Kata Kunci : tata kelola, kinerja keuangan, investasi, Pusat Investasi Pemerintah

Manajemen IPB, tahun 2013



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.